BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalah yang dijadikan sebagai topik penulis dalam rangka menyusun suatu laporan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagian Program dan Pelaporan (PROLAP) , yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan.. Sebelum BPKP terdapat lembaga yang bertugas dalam melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu yaitu Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

3.1.2 Visi dan Misi BPKP

BPKP memiliki visi dan misi sebagai berikut :

3.1.2.1 Visi

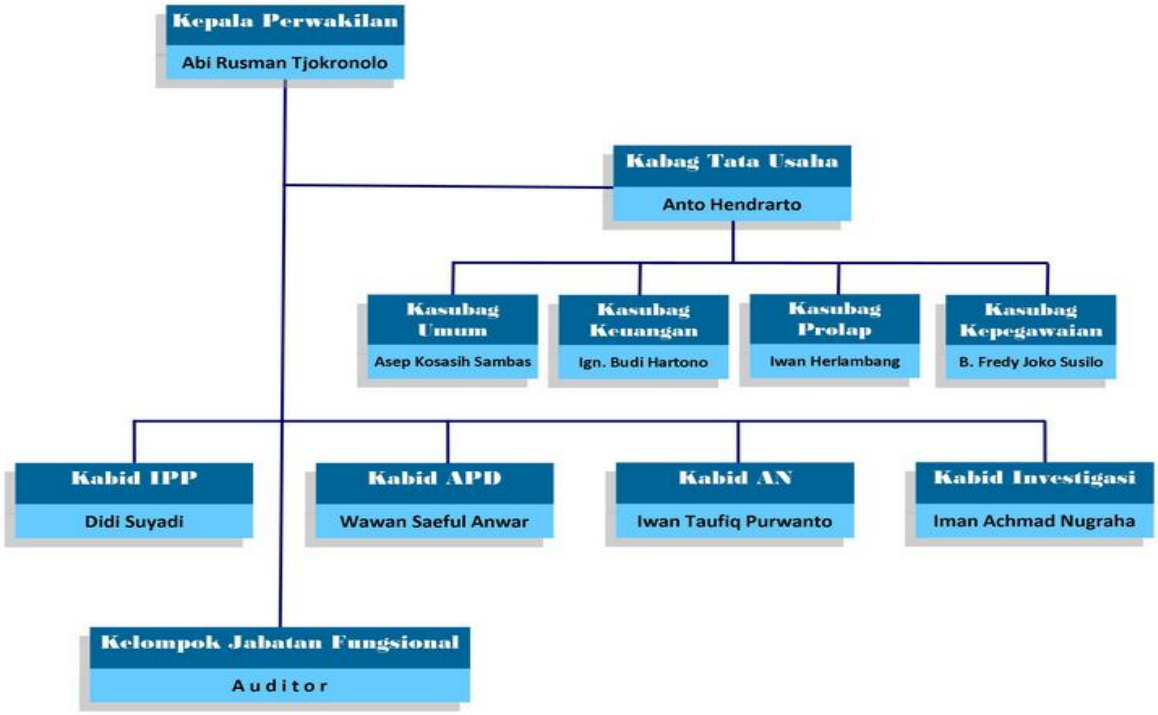
Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

3.1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
3. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

3.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, maka BPKP memiliki struktur organisasi seperti berikut;



Gambar 3.1 : Struktur organisasi pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan

3.1.4 Deskripsi Tugas

Deskripsi Tugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan terdiri dari:

1. Kepala Perwakilan

   Merupakan orang yang diangkat oleh untuk memimpin BPKP pada kantor perwakilan.

2. Bagian Tata Usaha

   sebagai unit pendukung kegiatan pengawasan, mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan.Bagian tata usaha dibagi kedalam beberapa sub unit yang terdiri dari;

   A)Bagian PROLAP

   Sub Bagian Program dan Pelaporan, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan:

   1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.

   2. Implementasi system informasi perencanaan untuk memonitor realisasi Rencana Kerja Tahunan.

   3. Monitoring pelaporan hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen.

B)Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan: Menangani persuratan, penggandaan dokumen, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

1. Implementasi system informasi perencanaan untuk memonitor realisasi Rencana Kerja Tahunan.

2. Pengelolaan Inventaris Kantor dengan implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

3. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor.

4. Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komputer.

3. Bagian APD

Sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di Perwakilan BPKP mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah daerah dan evaluasi hasil pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan Bidang APD terdiri dari:

A. Kegiatan Pengawasan.

B. Kegiatan Non Pengawasan.

4. Bagian Akuntan Negara (AN)

Sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di Perwakilan BPKP Jawa Barat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

5. Bagian Investigasi

Sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi JawaBarat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah.

6. Bagian IPP

Bagian IPP, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan Peningkatan kemampuan SDM dengan mengirimkan pegawai ke Pusdiklatwas BPKP Pengelolaan administrasi kepegawaian.

A Pengelolaan data kepegewaian menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPeg).

B Sosialisasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah.

C Mengadakan Diklat dan Ujian Sertifikasi JFA bagi APIP memfasilitasi Diklat Sertifikasi Mandiri dan Ujian Sertifikasi JFA di lingkungan Inspektorat Daerah.

7. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan:

A. Perencanaan anggaran melalui Anggaran Berbasis Kinerja.

B. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

C. Pengelolaan Keuangan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

D. Pembuatan Daftar Gaji.

E. Pengadministrasian dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan dijabarkan sebagai berikut: Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan tindakan *(action research).*

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut fakta pada saat penelitian dilakukan.

Sedangkan metode tindakan *(action research)* yaitu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, cara pendekatan baru,

atau produk pengetahuan yang baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia aktual / lapangan.

3.2.1 Desain Penelitian

Penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi, dimana metode tersebut dapat membuat gambaran secara sistematis, dan akurat mengenai fakta dan sifat pada suatu objek penelitian tertentu dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Sedangkan aksi ialah membuat rancangan sistem, hingga sistem tersebut siap diimplementasikan di lapangan.

3.2.2 Jenis Dan Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dibutuhkan suatu metode yang digunakan sebagai alat atau sarana pengambilan data-data, metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Sumber Data Primer

Dalam proses pengambilan sumber data primer, dapat dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem yang sedang berjalan dengan segala kekurangan sebagai kajian dalam pembuatan program aplikasi yang akan diajukan sebagai sistem yang baru. Seperti melakukan wawancara terhadap , pegawai dengan harapan dapat melengkapi data-data yang diperlukan.

b. Observasi

Metode ini merupakan pengamatan langsung dilapangan yang dapat mempermudah dalam proses pengumpulan data, sehingga data–data yang didapat terjamin keaslian dan keakuratannya, melakukan pengamatan langsung pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta cara kerja berdasarkan sistem yang sedang berjalan.

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder

Menggunakan data tertulis yaitu kegiatan memperoleh data dengan menganalisis dan mempelajari dokumen atau catatan yang ada pada BPKP Jawa Barat. seperti data pegawai,surat tugas dan perangkat lunak.

3.2.3 Metode Pendekatan Dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan yaitu suatu cara yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam sebuah sistem, dimana cara penyelesaiannya itu menggunakan metode pendekatan sistem dan metode pengembangan sistem.

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *object oriented*.Pendekatan berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma inidibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Alat – alat yang digunakan dalam pendeketan analisis dan perancangan berorientasi objek yaitu dengan notasi UML dengan membuat tujuh diagram yaitu, *use case diagram, activity diagram, squence diagram, classdiagram, object diagram, diagram component, diagram deployment*.

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem informasi ini adalah Metode Prototype. Metode Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program lebih cepat namun secara bertahap sehingga dapat segera dievaluasi oleh pemakai (*user),* penggunaan

metode prototype dalam proses pengembangan sistem informasi sangatlah baik, terutama pada keadaan kebutuhan pemakai uang sulit untuk diidentifikasi.

Adapun tahapan-tahapan dari metode prototype adalah sebagai berikut;

1. **Mengidentifikasi kebutuhan pemakai.** Pada tahap ini analisis sistem akan melakukan studi kelayakan dan studi terhadap kebutuhan pemakai, baik yang meliputi model *interface,* teknik procedural, maupun teknologi yang akan digunakan.
2. **Mengembangkan *prototype.*** Pada tahap kedua ini analisa sistem bekerja sama dengan pemrogram dalam mengembangkan *prototype* sistem untuk memperlihatkan permodelan yang akan dibangun.
3. **Menentukan apakan *prototype* dapat diterima oleh pemakai.**
4. **Mengadakan sistem operasional.** Melalui pemrograman berdasarkan permodelan sistem yang telah disepakati oleh pemesan sistem.
5. **Menguji sistem operasional.** Pada tahap ini pemrogram akan melakukan uji coba baik menggunakan data sekuder maupun data primer untuk memastikan bahwa sistem dapat berlangsug dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan pengguna.
6. **Menentukan sistem operasional.** Apakah dapat diterima oleh pemakai atau harus dilakukan beberapa perbaikan.

7. **Jika sistem telah disetujui.** Maka tahap terakhir adalah melakukan implementasi system.

3.2.4 Pengujian Software

Pengujian adalah proses pemeriksaan atau evaluasi sistem atau komponen sistem secara manual atau otomatis untuk memverifikasi apakah sistem memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dispesifikasikan atau mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan yang terjadi. Pengujian ditujukan untuk menghasilkan perangkat lunak *(software)* yang bebas kesalahan, paling tidak secara teknik.

Pengujian *black-box* adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian *black-box* merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pengujian *black-box* merupakan pendekatan komplementer dari teknik *white-box*, karena pengujian *black-box* diharapkan mampu mengungkap kelas kesalahan yang lebih luas dibandingkan teknik *white-box.*

Pengujian *black-box* berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak, untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan fungsional suatu program.

Adapun faktor-faktor pengujian *black-box* adalah ;

1. *Methodology*

   Menekankan bahwa aplikasi dirancang sesuai dengan strategi organisasi, kebijaksanaan, prosedur dan standar. Permintaan tersebut, harus diidentifikasikan, diimplementasikan dan dipelihara, sesuai dengan permintaan aplikasi.

2. *Correctness*

   Menjamin pada data yang dimasukkan proses dan output yang dihasilkan dari aplikasi harus akurat dan lengkap. Kelengkapan dan akurasi akan dicapai melalui control transaksi dan elemen data.

3. *Reliability*

   Menekankan bahwa aplikasi akan dilaksanakan dalam fungsi sesuai yang diminta dalam periode waktu tertentu. Pembetulan proses tersangkut kemampuan system untuk memvalidasi proses secara benar.

4. *Authorization*

   Menjamin data diproses sesuai dengan ketentuan manajemen. Authorisasi menyangkut proses transaksi secara umum dan khusus.